

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Badan Kesbangpol.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Bakesbangpol untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Lombok Tengah;
2. Menjadikan Bakesbangpol yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Lombok Tengah terhadap penyelenggara Pemerintah Kab. Lombok Tengah.

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, dalam salah satu pasalnya, mengatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Karenanya prinsip akuntabilitas mengharuskan dalam setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2013, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, bahwa tugas pokok Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesbangpol dengan **Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi** fungsi di bawah ini :

1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.1.1. Tugas Pokok :

Sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, bahwa tugas pokok Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesbangpol

1.1.2. Fungsi :

Untuk dapat melaksanakan Fungsinya, Badan Kesbangpol harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan secara integratif dapat diarahkan kepada pencapaian sasaran yang memungkinkan terlaksananya peran Badan Kesbangpol dengan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang keatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesbangpol;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2019 adalah sebanyak 25 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Keadaan : 31 Desember 2019

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.a b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 Orang 1 Orang 3 Orang 6 Orang
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. b. c.	
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV	5 Orang

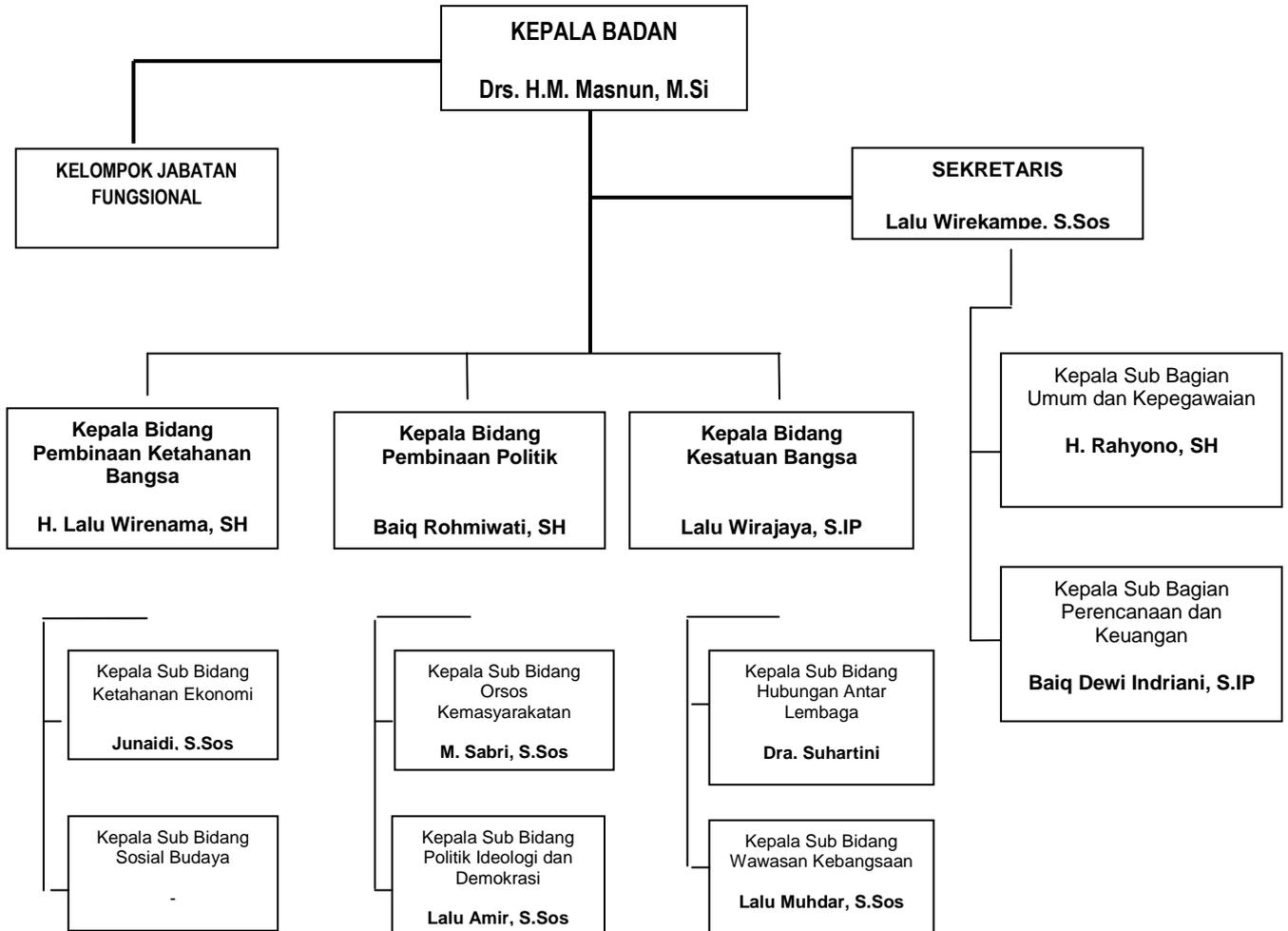
	b. III c. II d. I	14 Orang 6 Orang
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d.DIII e. SMA sederajat f. Paket A	 1 Orang 17 Orang 1 Orang 5 Orang 1 Orang

Berdasarkan tabel kualifikasi pegawai diatas, SDM/Aparatur yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Tengah dianggap sudah memiliki kualitas yang handal dan mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam upaya pelayanan prima kepada masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

STRUKTUR BADAN KESBANGPOL



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu.”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama melalui Revolusi Mental dengan Mengedepankan Nilai-nilai Agama dan Kearifan lokal, menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan gender, menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

- 3) Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli.
- 4) Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infrastruktur yang memadai, menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

tata ruang Kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu ” **Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental dengan Mengedepankan Nilai – Nilai Agama dan Kearifan Lokal**”.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Tengah

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 berdasarkan

kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah , maka dirumuskan tujuan **“Meningkatkan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Berpolitik, Sosial Budaya, serta Deteksi Dini dan Cegah Dini Terjadinya Konflik Sosial”**.

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Terwujudnya pola pemberdayaan tokoh agama yang tepat
2. Terwujudnya metode penanaman nilai – nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang efektif
3. Tercegah terjadinya konflik sosial
4. Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi
5. Terwujudnya tertib administrasi dan kenyamanan kantor
6. Terwujudnya efektifitas dan efisien kerja pelayanan umum dan urusan pemerintahan
7. Terwujudnya akuntabel dan akurasi kinerja keuangan dan asset perkantoran.

KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama, berpolitik, sosial budaya serta deteksi dini dan cegah dini terjadinya konflik sosial	1. Terwujudnya pola pemberdayaan tokoh agama yang tepat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat tersosialisasi wawasan kebangsaan (%) - Masyarakat yang dididik (%) - Pengembangan wawasan kebangsaan yang bermitra (%)
	2. Terwujudnya metode penanaman nilai – nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang efektif	Jumlah masyarakat tersosialisasi paham radikal dan aliran kepercayaan (%)
	3. Tercegah terjadinya konflik sosial	Penurunan jumlah konflik sosial/kasus (%)
	4. Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik (%) - Ormas yang terbina dan terdidik (%)

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Sasaran 1 : “Terwujudnya Pelayanan Publik Kesbangpol yang Berkualitas “

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<i>Isu Strategis</i>	<i>Wawasan kebangsaan belum dipahami secara utuh sehingga perpecahan mudah terjadi ditengah-tengah masyarakat</i>		
<i>Misi 2</i>	<i>Meningkatkan keterpaduan pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat	Terwujudnya Pola Pemberdayaan Tokoh agama yang tepat	Sosialisasi, Mobilisasi dan Edukasi masyarakat yang diarahkan pada budaya tertib	Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat/budaya
Meningkatkan partisipasi dan kewaspadaan masyarakat dalam bela negara	Terwujudnya Metode penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Negara yang Efektif	Pelatihan, Bimtek dan edukasi masyarakat pada 4 pilar wasbang	Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara
<i>Isu Strategis</i>	<i>Rendahnya Kesadaran politik dan tingginya Fanatisme kelompok/golongan yang mendorong perpecahan.</i>		
<i>Misi 3</i>	<i>Meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan pengembangan kehidupan Ekonomi politik</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas	Meningkatnya Partisipasi	Edukasi, matrikulasi,	Mengembangkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik	masayarakat dalam Politik	dan fasilitasi perwujudan suasana politik yang santun dan bertanggung jawab yang di arahkan pada pendidikan kesadaran politik masyarakat	pola rekrutmen dan kaderisasi orpol dan ormas
	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif	Matrikulasi, moblisasi dan fasilitasi ormas, orpol yang diarahkan pada kepekaan thdp sosial politik	Kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat dan organisasi politik
Meningkatkan efektifitas fasilitasi orpol/ormas dan Pemilu	Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi terhadap Parpol/ormas masyarakat	Fasilitas ormas dan orpol yang diarahkan pada kepekaan thdp masalah sosial politik	Penguatan parpol dan ormas
Isu Strategis	<i>Primordialisme mendorong sikap fanatisme agama, kedaerahan, kesukuan (SARA) menjadi ancaman dimasa yang akan datang</i>		
Misi 4	<i>Meningkatkan keterpaduan keserasian dan kesinambungan pemantapan stabilitas keamanan di daerah.</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat	Tercegah terjadinya Konflik Sosial	Sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi kepada masyarakat yang diarahkan pada masyarakat rawan konflik	Kerjasama dengan aparat penegak hukum, toga /toma adat dan budaya

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.5 Penyediaan ATK 1.6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.7 Penyediaan makanan dan minuman 1.8 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan	

	<p>Kebangsaan</p> <p>4.1 Koordinasi lintas agama (kemah bhakti pembauran)</p> <p>4.2 Seminar/diskusi wawasan kebangsaan</p>	
5	<p>Program Pendidikan Politik Masyarakat</p> <p>5.1 Sosialisasi kepada pengurus partai politik</p> <p>5.2 Pendataan dan monitoring kegiatan Ormas, LSM dan Yayasan</p> <p>5.3 Penyuluhan politik kepada masyarakat</p> <p>5.4 Pembinaan organisasi masyarakat dan partai politik</p>	
6	<p>Program Penanganan Konflik Sosial</p> <p>6.1 Pembinaan kewaspadaan dini</p> <p>6.2 Pemantauan orang asing</p> <p>6.3 Rencana aksi penanganan konflik</p> <p>6.4 Pelatihan ketahanan bangsa</p> <p>6.5 Pemantauan aliran kepercayaan</p>	

2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya toleransi dan pembauran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Dokumen kesepakatan bersama lintas agama dan kepercayaan	1 Dokumen
		Dokumen kesepakatan bersama antar etnis tentang pembaruan	300 Orang
2	Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi, Partisipasi dalam pemilu dan pilkada, data SKT/keberadaan ormas, LSM dan yayasan dan tingkat pelanggaran parpol peserta dalam pemilu	Pengurus parpol yang memahami mekanisme pelaporan dan administrasi, Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	16 Parpol
		Data ormas, LSM dan yayasan, hasil : Terdata dan Terawasinya Kegiatan Ormas (LSM dan Yayasan)	16 Parpol
		Meningkatnya partisipasi dan kesadaran berpolitik di masyarakat	50 Orang
		Meningkatnya Partisipasi Politik	11 Parpol
3	Kecepatan informasi konflik, timdu pks, piranti deteksi konflik, pencegahan terorisme dan radikalisme	Dokumen koordinasi pemimpin daerah dan pelaporan intelijen daerah, 12 Kecamatan dan Pusat Kota	12 Dokumen
		Dokumen pemantauan orang asing dan Ormas Asing	12 Dokumen
		Dokumen Laporan Capaian Target Kinerja Caturwulan RAD PKS	1 Dokumen

		Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat, Terlatihnya dan terfasilitasinya anggota FKDM dalam rangka Deteksi Dini dan cegah Dini	139 Orang
		Terdeksesinya jumlah aliran kepercayaan	1 Dokumen

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.381.780.200 (*Satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Bakesbangpol pada Tahun 2019 sesuai dengan tabel di atas sebagai berikut :

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Kesbangpol :

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

100 %

2. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran :

$$\frac{96,62}{100,00} \times 100\% = 96,62\%$$

100,00

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka keberhasilan pencapaian kinerja pada realisasi kinerja berada dalam kisaran 86 s/d 100 sehingga

dapat dikategorikan “ **BAIK** ”.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGAT KURANG

III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran No. 1 “ Terwujudnya Pelayanan Publik Kesbangpol Yang Berkualitas”

Sasaran No. 1 tersebut diukur dengan Nilai 86 s/d 100 dengan indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Terwujudnya toleransi dan pembauran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
2. Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi, partisipasi dalam pemilu dan pilkada, data SKT/keberadaan ormas, LSM dan Yayasan dan tingkat pelanggaran parpol peserta dalam pemilu

3. Kecepatan Informasi konflik, timdu PKS, piranti deteksi konflik, pencegahan terorisme dan radikalisme

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya toleransi dan pembauran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	%	100.00	100	100	100	100	100.00	Dokumen, Laporan
	Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi, partisipasi dalam pemilu dan pilkada, data SKT/keberadaan Ormas, LSM dan Yayasan dan tingkat pelanggaran parpol peserta dalam pemilu	%	100.00	100	100	100	100	100.00	Dokumen, Laporan
	Kecepatan informasi konflik, timdu PKS, piranti deteksi konflik, pencegahan terorisme dan radikalisme	%	100.00	100	100	100	100	100.00	100
RATA-RATA					100%	KRITERIA Tahun 2019: BAIK			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran No. 1 dengan indikator pencapaian sasaran No.1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghasilkan capaian kinerja 100% dengan kriteria Baik

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya toleransi dan pembauran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
capaian indicator tahun 2019 sebesar 100%
2. Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi,partisipasi dalam pemilu dan pilkada, data SKT/keberadaan Ormas, LSM dan Yayasan dan tingkat pelanggaran parpol peserta dalam pemilu
capaian indikator tahun 2019 sebesar 100%
3. Kecepatan informasi konflik, timdu PKS, piranti deteksi konflik, pencegahan terorisme dan radikalisme
capaian indikator tahun 2019 sebesar 100%

III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki.

Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipengaruhi oleh oleh kondisi aset yang

dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 dirinci sebagai berikut:

Tabel III
Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2019

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	225.000.000,00	1
2. KIB B	1,203.588.515,98	311
3. KIB C	887.700.000,00	5
4. KIB D	2.480.000,00	1
5. KIB E	230.000,00	4
6. KIB F	-	
Jumlah		322

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.4

**Realisasi Fisik Dan Keuangan Program Dan Kegiatan Yang Ada
Pada Bakesbangpol Untuk Tahun Anggaran 2019**

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Sisa Pagu (Rp.)	(%)	
				Keu	Fisik
BELANJA KESULURUHAN (BTL + BL)	3.879.537.090,70	3.724.060.007,00	155.477.083,70	95,99	100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.119.559.090,70	2.023.523.863,00	96.035.227,70	95,47	100,00
BELANJA LANGSUNG	1.759.978.000,00	1.700.536.144,00	59.441.856,00	96,62	100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	319.727.800,00	294.459.644,00	25.268.156,00	92,10	100,00
<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	20.280.000,00	15.384.587,00	4.557.770,00	77,53	87,53
<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	27.894.500,00	388.896.000,00	831.900,00	97,02	100,00
<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	91.963.500,00	74.426.264,00	17.537.236,00	80,93	90,93
<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	32.640.000,00	32.038.750,00	2.341.250,00	92,83	100,00
<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	16,183.000,00	16.183,000,00	-	100,0	100,00
<i>Penyediaan ATK</i>	40.766.800,00	40.766.800,00	-	100,0	100,00

<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,0	100,00
<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,0	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.300.000,00	96.589.000,00	0,00	100,0	100,00
<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100	100,00
<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor</i>	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100	100,00
Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.170.000,00	21.650.000,00	-	89,57	99,57
<i>Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	24.170.000,00	21.650.000,00	-	89,57	99,57
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	117.150.000,00	117.150.000,00	-	100	100,00
<i>Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembauran)</i>	52.220.000,00	52.220.000,00	-	100	100,00
<i>Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan</i>	64.930.000,00	64.930.000,00	-	100	100,00

Program Pendidikan Politik Masyarakat	225.535.200,00	222.390.200,00	3.145.000,00	98,61	100,11
<i>Sosialisasi kepada Pengurus Partai Politik</i>	21.734.000,00	21.734.000,00	-	100	100,00
<i>Pendataan dan Monitoring Kegiatan Ormas LSM dan Yayasan</i>	75.000.000,00	72.625.000,00	2.375.000,00	96,83	100,00
<i>Penyuluhan Publik Kepada Masyarakat</i>	71.251.200,00	71.121.200,00	130.000,00	99,82	100,00
<i>Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik</i>	57.550.000,00	56.910.000,00	640.000,00	98,89	100,00
Program Penanganan Konflik Sosial	1.039.095.000,00	1.010.585.500,00	28.509.500,00	97,26	100,00
<i>Pembinaan Kewaspadaan Dini</i>	840.000.000,00	823.358.000,00	16.642.000,00	98,02	100,00
<i>Pemantauan Orang Asing</i>	50.000.000,00	41.557.500,00	8.442.500,00	83,12	100,00
<i>Rencana Aksi penanganan konflik sosial</i>	50.000.000,00	46.735.000,00	3.265.000,00	93,47	100,00
<i>Pelatihan Ketahanan Bangsa</i>	74.095.000,00	73.935.000,00	160.000,00	99,78	100,00
<i>Pemantauan Aliran Kepercayaan</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100	100,00
JUMLAH	3.879.537.090,70	3.817.882.450,00	155.477.083,70	95,99	100,00

Alokasi dana untuk program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2019 mempunyai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.119.559.090,70 dengan realisasi sebesar Rp. 2.023.523.863,- atau 95,47%. Sedangkan Anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.759.978.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.700.536.144,- atau 96,62%

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4 di bawah ini:

Tabel 4

Anggaran dan Realisasi dari Pelaksanaan Program / Kegiatan Yang Dilaksanakan Bakesbangpol Kab. Lombok Tengah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	Present ase (%)	Unit kerja yang melak sanakan program/ kegiatan (Sekretariat/ Bidang/ Bagian/ Seksi)
	PEGAWAI (Rp)	BARANG DAN JASA (Rp)	MODAL (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.119.559.090,70			2.119.559.090,70	2.023.523.863	95,47	
A. BELANJA PEGAWAI	2.119.559.090,70			2.119.559.090,70	2.023.523.863	95,47	
<i>Gaji dan Tunjangan</i>	<i>2.119.559.090,70</i>			<i>2.119.559.090,70</i>	2.023.523.863	95,47	
II. BELANJA LANGSUNG	1.759.978.000,00						
Program pelayanan adm perkantoran	<i>23.040.000</i>	268.793.300	27.894.500	319.727.800,00	294.459.644,00	92,10	Sekretariat

<i>Penyediaan jasakom.sumber daya air, listrik</i>		20.280.000		20.280.000	15.722.230	77,53	
<i>Penyediaan jasa peralatan & perlgkpn kantor</i>			27.894.500	27.894.500	27.062.600	97,02	
<i>Penyud. jasa pem. dan perizinan kend. Dinas</i>		91.963.500,00		91.963.500,00	74.426.264	80,93	
<i>Penyediaan Jasa Adm. Keuangan</i>	23.040.000	9.600.000		32.640.000	30.298.750	92,83	
<i>Penyed. Jasa Kebersihan Kantor</i>		16.183.000 -		16.183.000	16.183.000	100	
<i>Penyediaan ATK</i>		40.766.800		40.766.800	40.766.800	100	
<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>		15.000.000		15.000.000	15.000.000	100	
<i>Rapat -rapat koor dan konsstsi keluar daerah</i>		75.000.000		75.000.000	75.000.000	100	
<i>Program peningkatan sarana</i>	-	34.300.000		34.300.000	34.300.000	100	Sekretariat

dan prasarana aparatur							
<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>		19.800.000		19.800.00	19.800.000	100	
<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprs.</i>		14.500.000		14.500.000	14.500.000	100	
Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.170.000			24.170.000	21.650.000	89,57	
<i>Penyusunan laporan capaian kinerja iktisar realisasi kinerja SKPD</i>	24.170.000			24.170.000	21.650.000	89,57	
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3.200.000	113.950.000		117.150.000	117.150.000	100	Bidang Wasbang

<i>Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bhakti)</i>	2.150.000	50.070.000		52.220.000	52.220.000	100	
<i>Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan</i>	1.050.000	63.880.000		64.930.000	64.930.000	100	
Program Pendidikan Politik Masyarakat	111.155.000	114.380.200		225.535.200	222.390.200	98,61	Bidang Pembinaan Politik
<i>Pembinaan Ormas dan Partai Politik</i>	31.890.000	25.660.000		57.550.000	56.910.000	98,89	
<i>Sosialisasi kepada Pengurus Partai Politik</i>	650.000	21.084.000		21.734.000	21.734.000	100	
<i>Pendataan dan Monev. Keg. Ormas, LSM dan Yaysan</i>	63.005.000	11.995.000		75.000.000	72.625.000	96,83	
<i>Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat</i>	15.610.000	55.641.200		71.251.200	71.121.200	99,82	
Program Penanganan Konflik Sosial (PKS)	896.875.000	142.220.000		1.039.095.000	1.010.585.500	97,26	Bidang pemb. Ket. bangsa

<i>Pembinaan Kewasapadaan Dini</i>	794.300.000	45.700.000		840.000.000	823.358.000	98,02	
<i>Pemantauan Orang Asing</i>	36.750.000	13.250.000		50.000.000	41.557.500	83,12	
<i>Rencana aksi penanganan konflik sosial</i>	22.800.000	27.200.000		50.000.000	46.735.000	93,47	
<i>Pelatihan ketahanan bangsa</i>	22.025.000	52.070.000		74.095.000	73.935.000	99,78	
<i>Pemantauan aliran kepercayaan</i>	21.000.000	4.000.000		25.000.000	25.000.000	100	
Jumlah I + II	3.177.999.090,70	673.643.500	27.894.500	3.879.537.090,70	3.724.060.007	95,99	

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kabupaten Lombok Tengah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan bahwa sasaran - sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dikategorikan **memuaskan**, karena nilai capaiannya masih dalam standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Disadari bahwa selama tahun 2019 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik termasuk Pemberian Pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal, isu-isu Lintas Sektoral, Upaya Cegah Dini dan Deteksi Dini, Pelayanan Administrasi/rekomendasi terhadap Ormas, LSM dan Yayasan, Implementasi Konsensus/4 PILAR. Untuk itu, Bakesbangpol, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah progresif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja Pelayanan Publik, baik melalui reformasi / perubahan

pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pelayanan dan pengalokasian anggaran.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategi Bakesbangpol Tahun Anggaran 2019 belum memenuhi harapan seluruh masyarakat, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.